

ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN PASAMAN

Wenny Widya Wahyudi

Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik dan Perencanaan
Universitas Bung Hatta, Padang (25111), Indonesia

ABSTRAK

Potensi ekonomi suatu wilayah apabila diketahui dan dikembangkan dengan tepat, maka perekonomian suatu wilayah akan berkembang dengan baik. Untuk mengetahui potensi ekonomi suatu wilayah yaitu dengan melihat sektor-sektor yang paling berkembang pada suatu wilayah. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasaman tahun 2014, mampu mengimbangi pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat, yaitu rata-rata diatas 5 persen. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Pasaman sebenarnya mampu meningkatkan pertumbuhannya jika mampu memanfaatkan potensi-potensi daerah yang dimiliki. Untuk mengetahui tentang potensi ekonomi yang menunjang pembangunan ekonomi daerah, perlu dilakukannya analisis sektor potensial dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Pasaman. Metode Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis MRP, LQ dan analisis Overlay dari tahun 2012-2015 dengan menggunakan data pertumbuhan PDRB. Dari hasil analisis diketahui bahwa belum adanya sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, baik di daerah Kabupaten Pasaman maupun di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan sektor basis yang berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sektor yang basis atau sektor yang berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai LQ sebesar 2,13 persen, tetapi sektor tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah terbukti dari analisis MRP dengan nilai dibawah 1,00 persen. Dalam perencanaan pembangunan wilayah hendaknya mengutamakan pertumbuhan sektor-sektor basis ekonomi.

Kata kunci: potensi ekonomi, sektor potensial, kabupaten pasaman, pusat pertumbuhan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu wilayah mempunyai makna yang berbeda dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah, karena pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan yang terjadi pada suatu wilayah. Setiap wilayah selalu terdapat sektor-sektor yang bersifat strategis atau berpotensi akibat besarnya sumbangan yang diberikan dalam perekonomian wilayah serta keterkaitan antar sektoral dan kaitan sektor dengan spasialnya. Perkembangan sektor strategis atau potensial memiliki dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan. Dampak tidak langsung akibat perkembangan suatu sektor berpengaruh terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya, dan secara spasial berpengaruh secara luas di seluruh wilayah sasaran.

Potensi ekonomi pada suatu wilayah apabila diketahui dan dikembangkan dengan tepat, maka perekonomian suatu wilayah akan berkembang dengan baik. Untuk mengetahui potensi ekonomi suatu wilayah yaitu dengan melihat sektor-sektor yang paling berkembang pada suatu wilayah. Menurut Tarigan (2012) untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah, salah satunya dapat dilihat dari pembangunan sektoral, dimana pendekatan sektoral adalah pencapaian sasaran pembangunan wilayah yang meliputi seluruh kegiatan berdasarkan sektor-sektor atau lapangan usahanya.

* Korespondensi:

Email : wennyww4@gmail.com

Pembagian sektor-sektor di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (2016) terdiri dari 17 sektor yaitu (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) sektor pertambangan dan penggalan, (3) sektor Industri pengolahan, (4) sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, (5) sektor pengelolaan sampah, Limbah dan daur Ulang, (6) sektor konstruksi, (7) sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, (8) sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, (9) sektor informasi dan komunikasi, (10) jasa keuangan dan asuransi, (11) real estat, (12) jasa perusahaan, (13) administrasi pemerintahan, (14) pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (17) jasa lainnya.

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten dengan PDRB yang relatif kecil diantara 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut tercermin dari persentase kontribusi PDRB seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015, persentase kontribusi Kabupaten Pasaman yaitu menyumbang sebesar 3,61 persen, yaitu penyumbang PDRB kesepuluh dari 12 keseluruhan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Jika dilihat dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasaman tahun 2014, Kabupaten Pasaman mampu mengimbangi pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat, yaitu rata-rata di atas 5 persen. Hal ini menceminkan bahwa Kabupaten Pasaman sebenarnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya jika mampu memanfaatkan potensi-potensi daerah yang dimiliki. Untuk mengetahui tentang potensi ekonomi yang dimiliki untuk menunjang pembangunan ekonomi daerah, sehingga perlu dilakukannya analisis sektor potensial dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Pasaman.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi Wilayah

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai perubahan dalam banyak aspek kehidupan manusia yang bertujuan dan memberi harapan kepada perbaikantingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan lebih merata yang dalam jangka panjang agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. Untuk mencapaitujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan, upaya-upaya pembangunan harus diarahkan kepada efisiensi (*efficiency*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*) dalam memberi panduan kepada alokasi sumber-sumber daya (semua kapital yang berkaitan dengan natural, human, man-made maupun sosial) (Anwar, 2005).

Menurut Muta'ali (2012) Pembangunan pada hakikatnya adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk maksud dan tujuan tertentu. Ketersediaan sumberdaya sangat terbatas sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang tepat bagi pelestarian lingkungan hidup agar kemampuan serasi dan seimbang untuk mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam pembangunan terjadi proses optimasi, dan interaksi antara komponen pembangunan, yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, tata nilai masyarakat, dan teknologi.

Pembangunan secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi-kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto. Pertumbuhan ekonomi wilayah bisa mengalami suatu kenaikan yang berkelanjutan apabila memiliki kemampuan untuk menyediakan berbagai jenis barang dan jasa ekonomi kepada masyarakatnya. Nilai tambah pada suatu daerah juga bisa mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Distribusi pendapatan dalam pada awalnya cenderung rendah, tetapi selanjutnya, distribusi pendapatan akan meningkat, proses pertumbuhan yang berkesinambungan berasal dari perluasan sektor modern. Hal ini tercermin dari Kurva Kuznets (Jhingan, 2008).

Menurut Rustiadi et al (2011) wilayah yang berkembang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan antara sektor ekonomi wilayah, dimana terjadi transfer input dan output barang dan jasa antar sektor yang sangat dinamis. Secara institusional keterpaduan sektoral tidak hanya mencakup hubungan antar lembaga sektoral pemerintahan tetapi juga antar pelaku-pelaku ekonomi (swasta dan masyarakat) secara luas dengan latar sektor yang berbeda.

Setiap wilayah selalu terdapat sektor-sektor yang bersifat strategis atau berpotensi akibat besarnya sumbangan yang diberikan dalam perekonomian wilayah serta keterkaitan antar sektoral dan kaitan sektor dengan spasialnya. Perkembangan sektor strategis atau potensial memiliki dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan. Dampak tidak langsung akibat perkembangan suatu sektor berpengaruh terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya, dan secara spasial berpengaruh secara luas di seluruh wilayah sasaran.

Secara fisiologis suatu proses pembangunan diartikan sebagai sesuatu yang sistematis dan berkesinambungan sehingga terciptanya keadaan yang mampu menyediakan alternatif yang beragam dan sah untuk mencapai aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Dengan kata lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Di Indonesia dan di berbagai negara berkembang, istilah pembangunan seringkali lebih berkonotasi fisik artinya melakukan kegiatan-kegiatan membangun yang bersifat fisik, bahkan seringkali secara lebih sempit diartikan sebagai membangun infrastruktur/fasilitas fisik.

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Tambunan (2016) pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara merupakan suatu kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah atau negara adalah sebagai penambahan jumlah dan nilai *output agregat* atau Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan nasional, dan penambahan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di suatu negara atau wilayah. Menurut Tarigan (2015) untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan dan kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi pada suatu masyarakat di suatu daerah. Faktor-faktor produksi seperti tanah,

modal, tenaga kerja, dan teknologi merupakan gambaran dari pendapatan masyarakat dan gambaran suatu kondisi masyarakat yang makmur.

Salah satu pakar teori pertumbuhan ekonomi yaitu Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk merupakan salah satu faktor dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan berkembangnya suatu penduduk pada suatu wilayah maka secara tidak langsung suatu pasar juga akan berkembang luas, seiring dengan berkembang luasnya suatu pasar maka produktivitas tenaga kerja, upah, dan keuntungan akan meningkat, sehingga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan seluruh sumberdaya secara optimal.

Berkembangnya kegiatan perekonomian pada suatu wilayah mencerminkan kemakmuran dalam masyarakat disebut juga dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Masalah makro ekonomi dalam jangka panjang merupakan masalah dalam pertumbuhan ekonomi. Semakin berkembangnya kemampuan memproduksi suatu barang dan jasa karena bertambahnya faktor-faktor produksi tidak berarti diiringi juga dengan bertambahnya produksi barang dan jasa dengan besar yang sama. Kemampuan memproduksi yang menyebabkan pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya (Sukirno, 1996).

Adanya sekelompok kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu merupakan karakteristik pertama dari sebuah pusat pertumbuhan. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan adalah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, atau paling kurang daerah sekitarnya secara dinamis. Dengan demikian tidak semua kegiatan ekonomi pada suatu wilayah bisa dianggap sebagai pusat pertumbuhan. Kemampuan untuk mendorong suatu ekonomi daerah secara dinamis dapat dilihat dari dampak ekonomi yang dihasilkan untuk daerah sekitarnya, baik dalam bentuk peningkatan kegiatan produksi, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Suatu kegiatan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan nasional bisa disebut juga dengan kegiatan ekonomi yang berperan sebagai pusat pertumbuhan. Karena hal tersebut termasuk salah satu karakteristik dari suatu pusat pertumbuhan. Salah satu dari karakteristik pusat pertumbuhan adalah kegiatan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara dinamis dalam perekonomian suatu wilayah. Selain itu, suatu kegiatan ekonomi dapat disebut sebagai pusat pertumbuhan apabila terdapat keterkaitan input dan output yang kuat antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat tersebut (Sjafrizal, 2012).

2.3 Teori Basis Ekonomi

Dasar pandangan teoribasis ekonomi (*Economic Base Theory*) adalah pada laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang ditentukan dengan seberapa besar suatu wilayah mampu meningkatkan kegiatan ekspornya. Kegiatan ekspor merupakan semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau jasa dan mampu menarik konsumen dari luar daerahnya untuk mengkonsumsi produk atau

memakai jasa yang ditawarkannya sehingga menghasilkan pendapatan dari luar daerahnya, yang bisa disebut juga dengan kegiatan basis. Selain kegiatan basis, kegiatan ekonomi yang kurang berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi suatu wilayah adalah disebut dengan kegiatan non basis.

Semua kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kegiatan non basis disebut juga dengan kegiatan/sektor pelayanan. Hal tersebut berkaitan dengan peran sektor non basis dalam memenuhi kebutuhan lokal suatu wilayah. Karena sifat kegiatan ekonomi non basis yang hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, sehingga permintaan pada sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat lokal pada suatu wilayah. Dengan demikian kenaikannya seiring dengan kenaikan pendapatan masyarakat setempat. Menurut Tarigan (2012) kegiatan ekonomi non basis terikat dengan kondisi ekonomi lokalnya dan tidak mempunyai kemampuan untuk berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Kegiatan ekonomi yang mempunyai kemampuan dalam meningkatkan perekonomian wilayahnya melebihi pertumbuhan ekonomi wilayahnya adalah sektor basis (Tarigan, 2012).

Semakin banyak suatu wilayah mempunyai sektor basis, maka akan semakin bertambahnya arus pendapatan kewilayah tersebut, sehingga akan menciptakan tingginya permintaan terhadap barang dan jasa. Secara tidak langsung kegiatan ekonomi yang bukan basis juga ikut didorong untuk berkembang. Menurut Priyarsono et al. (2007), Suatu kegiatan ekonomi basis atau disebut juga dengan istilah kegiatan/sektor unggulan pada suatu wilayah tidak bersifat tetap melainkan bisa berubah-ubah tergantung dari perkembangan jaringan komunikasi dan transportasi, perkembangan pendapatan suatu daerah, perkembangan teknologi, dan perkembangan prasarana ekonomi dan sosial. Selain itu kegiatan ekonomi unggulan/basis juga bisa mengalami penurunan atau tidak lagi menjadi sektor unggulan pada suatu wilayah, hal ini biasanya dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan dari luar wilayah dan kehabisan sumberdaya yang tersedia.

Faktor utama yang menentukan suatu pertumbuhan ekonomi wilayah yaitu sektor basis. Sektor yang berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga melahirkan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal (tenaga kerja dan bahan baku) yang diekspor untuk memenuhi setidaknya permintaan dari luar daerah. Dengan demikian sektor basis akan mampu meningkatkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan metode analisis yang digunakan dalam menganalisis kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi pada suatu wilayah berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB. MRP adalah kegiatan membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan ekonomi baik dalam skala yang lebih kecil maupun dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode MRP, sehingga dapat mengetahui sektor potensial di Kabupaten Pasaman.

Dalam analisis MRP terdiri dari 2 macam rasio pertumbuhan, yaitu :

1. Rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs) yaitu Perbandingan rata-rata pertumbuhan pendapatan (PDRB) sektor i di wilayah studi dengan pertumbuhan pendapatan (PDRB) sektor i di wilayah referensi, dengan formulasi :

$$RPs = \frac{\Delta Y_{ij}/Y_{ij}(t)}{\Delta Y_j/Y_j(t)}$$

2. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr) yaitu Perbandingan rata-rata pertumbuhan pendapatan (PDRB) sektor i di wilayah studi dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan (PDRB) di wilayah referensi, dengan formulasi :

$$RPr = \frac{\Delta Y_{in}/Y_{in}(t)}{\Delta Y_n/Y_n(t)}$$

$$\Delta Y_{in} = Y_{in}(t+1) - Y_{in}(t)$$

$$\Delta Y_n = Y_n(t+1) - Y_n(t)$$

$$\Delta Y_{ij} = Y_{ij}(t+1) - Y_{ij}(t)$$

$$\Delta Y_j = Y_j(t+1) - Y_j(t)$$

ΔY_{in} = Merupakan perubahan PDRB Provinsi Sumatera Barat sektor i.

$Y_{in}(t)$ = PDRB Provinsi Sumatera Barat sektor i awal

ΔY_n = Merupakan perubahan PDRB Provinsi Sumatera Barat.

$Y_n(t)$ = PDRB Provinsi Sumatera Barat pada tahun awal

ΔY_{ij} = Merupakan perubahan PDRB Kabupaten Pasaman sektor i.

$Y_{ij}(t)$ = PDRB Kabupaten Pasaman sektor i tahun awal

ΔY_j = merupakan perubahan PDRB Kabupaten Pasaman.

$Y_j(t)$ = PDRB Kabupaten Pasaman pada tahun awal

Hasil dari perhitungannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Pertama :

Jika nilai RPr (+) dan RPs(+) berarti kegiatan ekonomi tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol pada tingkat Provinsi Sumatera Barat dan tingkat Kabupaten Pasaman.

2. Klasifikasi Kedua :

Jika nilai RPr (+) dan nilai RPs (-) berarti kegiatan ekonomi tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol pada tingkat Provinsi Sumatera Barat tetapi memiliki pertumbuhan yang belum menonjol pada tingkat Kabupaten Pasaman.

3. Klasifikasi Ketiga :

Jika nilai RPr (-) dan nilai RPs (+) berarti Jika nilai RPr (+) dan nilai RPs (-) berarti kegiatan ekonomi tersebut memiliki pertumbuhan yang belum menonjol pada tingkat Provinsi Sumatera Barat tetapi memiliki pertumbuhan yang menonjol pada tingkat Kabupaten Pasaman.

4. Klasifikasi Keempat :

yaitu nilai RPr (-) dan nilai RPs (-) berarti kegiatan ekonomi tersebut memiliki pertumbuhan yang tidak menonjol pada tingkat Provinsi Sumatera Barat dan tingkat Kabupaten Pasaman.

3.2 Location Quotient (LQ)

Metode analisis LQ merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui tentang sektor yang berpotensi pada suatu wilayah. Cara untuk mengindikasi suatu kegiatan ekonomi basis atau non basis. Metode ini menggunakan data PDRB semua sektor Kabupaten Pasaman dan PDRB semua sektor Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2012-2015, untuk mengetahui sektor basis yang ada di Kabupaten Pasaman.

Persamaan LQ menurut Blakely (1994) dalam Panuju DR dan Rustiadi E (2012), sebagai berikut:

$$LQ_{ij} = \frac{X_i/X_t}{Y_i/Y_t}$$

Dimana :

X_i = PDRB Lapangan Usaha idi Kabupaten Pasaman

X_t = PDRB total di Kabupaten Pasaman

Y_i = PDRB Lapangan Usaha i di Provinsi Sumatera Barat

Y_t = PDRB total di Provinsi Sumatera Barat

Kriteria LQ

$LQ > 1$:

Berarti sektor tersebut menjadi sektor basis atau menjadi sumber pertumbuhan, hasil produksinya tidak saja bisamencukupi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi dapat juga diekspor ke wilayah lain.

$LQ = 1$:

Berarti sektor tersebut tergolong non basis. Produksinya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor.

$LQ < 1$:

Berarti sektor tersebut juga tergolong non basis. Produksinya tidak mampu mencukupi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar.

3.3 Analisis Overlay

Analisis Overlay digunakan untuk menentukan sektor unggulan dengan menggabungkan alat analisis dengan tujuan untuk menyaring hasil analisis yang paling baik. Metode ini memberikan penilaian kepada sektor-sektor ekonomi dengan melihat nilai positif (+) dan negatif (-). Kegiatan Ekonomi yang memiliki nilai positif (+) paling banyak artinya kegiatan ekonomi tersebut adalah sektor unggulan dan jika suatu sektor tidak mempunyai nilai positif berarti sektor tersebut bukan sektor unggulan.

Notasi yang menunjukkan positif merupakan nilai koefisien dari komponen lebih dari satu dan notasi negatif memiliki arti nilai kurang dari satu. RPr bernotasi positif berarti pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan total di wilayah referensi. RPs bernotasi positif berarti pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibanding pertumbuhan sektor yang sama di wilayah referensi. sementara untuk metode LQ nilai positif diberikan pada kegiatan dari ekonomi yang nilai koefisien LQ dari 1 ($LQ > 1$).

terdapat tiga kriteria dalam analisis overlay yaitu :

1. RPr, RPs. dan LQ ketiganya bernilai positif (+), berarti sektor tersebut mempunyai potensi dan daya saing yang kompetitif maupun daya saing komparatif yang lebih dominan dibanding kegiatan ekonomi yang sama di tingkat provinsi.
2. RPr bernilai negatif (-), sedangkan RPs dan LQ bernilai positif (+), berarti sektor tersebut merupakan spesialisasi kegiatan ekonomi di Kabupaten.
3. RPr, RPs, dan LQ ketiganya bernilai negatif (-), berarti sektor tersebut kurang memiliki daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan kegiatan yang sama pada tingkat provinsi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Metode Rasio Pertumbuhan (MRP)

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat dilihat pada Tabel 1 perolehan rasio pertumbuhan sektoral pada perekonomian Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan Hasil analisis MRP pada tabel 1, diperoleh hasil berdasarkan klasifikasi 1 yaitu bernilai RPr (+) dan RPs (+) yang merupakan kegiatan sektor-sektor pada tingkat Provinsi Sumatera Barat mempunyai pertumbuhan menonjol demikian pula pada tingkat Kabupaten Pasaman kegiatan sektor ini disebut sebagai dominan pertumbuhan. Sektor-sektor yang termasuk dalam klasifikasi 1 yaitu terdiri dari sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel 1. Hasil Analisis Metode Rasio Pertumbuhan Kabupaten Pasaman Tahun 2012-2015

No	Lapangan Usaha	RPr		RPs	
		Nilai	Notasi	Nilai	Notasi
1	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	0,79	-	0,89	-
2	Pertambangan dan Penggalian	0,83	-	1,09	+
3	Industri Pengolahan	0,69	-	0,78	-
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,79	-	0,64	-
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,85	-	1,09	+
6	Konstruksi	1,39	+	1,20	+
7	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,98	-	1,17	+
8	Transportasi dan Pergudangan	1,43	+	1,54	+
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,11	+	1,07	+
10	Informasi dan Komunikasi	1,62	+	1,65	+
11	Jasa keuangan dan Asuransi	0,82	-	1,10	+
12	Real Estat	0,94	-	0,92	-
13	Jasa Perusahaan	1,19	+	1,01	+
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,47	-	0,68	-
15	Jasa Pendidikan	1,38	+	1,46	+
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,35	+	1,27	+
17	Jasa Lainnya	1,12	+	0,82	-

Sumber : BPS 2016 (Data Diolah)

Sektor jasa lainnya termasuk klasifikasi 2, bernilai RPr (+) dan RPs (-) yang berarti kegiatan sektor-sektor pada tingkat Provinsi Sumatera Barat mempunyai pertumbuhan menonjol namun pada tingkat Kabupaten Pasaman belum menonjol. Selanjutnya sektor-sektor yang termasuk pada klasifikasi 3, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor jasa keuangan dan asuransi yang bernilai RPr (-) dan nilai RPs (+), berarti kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi Sumatera Barat mempunyai pertumbuhan tidak menonjol sementara pada Kabupaten Pasaman termasuk menonjol.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor real estat, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib termasuk pada klasifikasi 4, yang bernilai RPr (-) dan nilai RPs (-) berarti kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi Sumatera Barat mempunyai pertumbuhan rendah begitu pula pada tingkat Kabupaten Pasaman.

4.2 Hasil Analisis Location Quotient (LQ)

Hasil analisis Location Quotient (LQ) di Kabupaten Pasaman dari tahun 2012 sampai dengan 2015 diketahui bahwa sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib merupakan sektor basis ekonomi atau sektor yang menjadi sumber pertumbuhan, yang hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi dapat juga diekspor ke luar wilayah. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang

yang mempunyai nilai LQ sama dengan 1,00 tergolong kedalam sektor non basis yang berarti produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor.

Tabel 2. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Pasaman Tahun 2012-2015

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	Rerata LQ	Notasi
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,12	2,12	2,14	2,14	2,13	+
2	Pertambangan dan Pengeksploasian	0,44	0,43	0,44	0,45	0,44	-
3	Industri Pengolahan	0,44	0,45	0,44	0,45	0,44	-
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,15	0,15	0,16	-
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,00	1,00	1,01	1,01	1,00	-
6	Konstruksi	0,52	0,52	0,50	0,50	0,51	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,82	0,83	0,84	0,84	0,83	-
8	Transportasi dan Pergudangan	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	-
10	Informasi dan Komunikasi	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	-
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,77	0,79	0,81	0,81	0,79	-
12	Real Estat	0,69	0,70	0,69	0,69	0,69	-
13	Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	-
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,19	1,22	1,24	1,23	1,22	+
15	Jasa Pendidikan	0,57	0,56	0,57	0,57	0,57	-
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	-
17	Jasa Lainnya	0,53	0,52	0,51	0,51	0,52	-

Sumber : BPS 2016 (Data Diolah)

Sektor yang termasuk non basis dengan nilai LQ kecil dai 1,00 yaitu sektor pertambangan dan pengkalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa lainnya. Berarti sektor-sektor tersebut kurang memiliki daya saing kempetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan kegiatan yang sama pada tingkat provinsi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor basis dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 2, 13 persen, yang mempunyai makna bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang paling besar kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hal ini bukan berarti sektor yang tergolong non basis tidak memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Pasaman, karena dengan adanya sektor basis diharapkan dapat mengembangkan sektor non basis menjadi sektor basis baru.

4.3 Hasil Analisis Overlay

Pada analisis overlay ini data yang digunakan adalah data analisis MRP yang terdiri dari rata-rata nilai RPr dan RPs dari tahun 2012 sampai tahun 2015, dan dari rata-rata nilai analisis LQ dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Hasil analisis overlay dapat dilihat pada tabel 3. Pada hasil analisis overlay, dapat diketahui bahwa tidak ada sektor yang termasuk kedalam kriteria 1. Kriteria 1 merupakan kriteria dengan nilai RPr, RPs, dan LQ bernilai positif (+), berarti tidak ada sektor-sektor yang mempunyai potensi daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan dengan kegiatan yang sama di tingkat provinsi. Jika dilihat dari kriteria 2, yaitu RPr bernilai negatif (-), dengan RPs dan LQ bernilai positif (+) juga tidak ditemukan pada tabel 3, yang berarti Kabupaten Pasaman tidak mempunyai sektor-sektor yang berspesialisasi kegiatan ekonomi di Kabupaten.

Sektor-sektor dengan nilai RPr, RPs, dan LQ bernilai negatif (-), yaitu terdiri dari sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yang berarti sektor tersebut kurang memiliki daya saing kompetitif maupun komparatif di Kabupaten Pasaman yang lebih unggul dibandingkan kegiatan yang sama pada tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Temuan pada penelitian ini selama tahun 2012-2015 diketahui bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Pasaman dengan rata-rata nilai PDRB sebesar 50 persen dan merupakan sektor basis yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman dengan nilai LQ besar dari 2, tetapi mempunyai tingkat pertumbuhan yang rendah. Hal ini juga didukung dengan data Laju Pertumbuhan sektor-sektor di Kabupaten Pasaman, dari persentase laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berfluktuasi dari tahun ketahun selama tahun 2012-2015 (gambar 1). Dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor lainnya yang ada di Kabupaten Pasaman hanya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutonya berada dibawah nilai 5 persen.

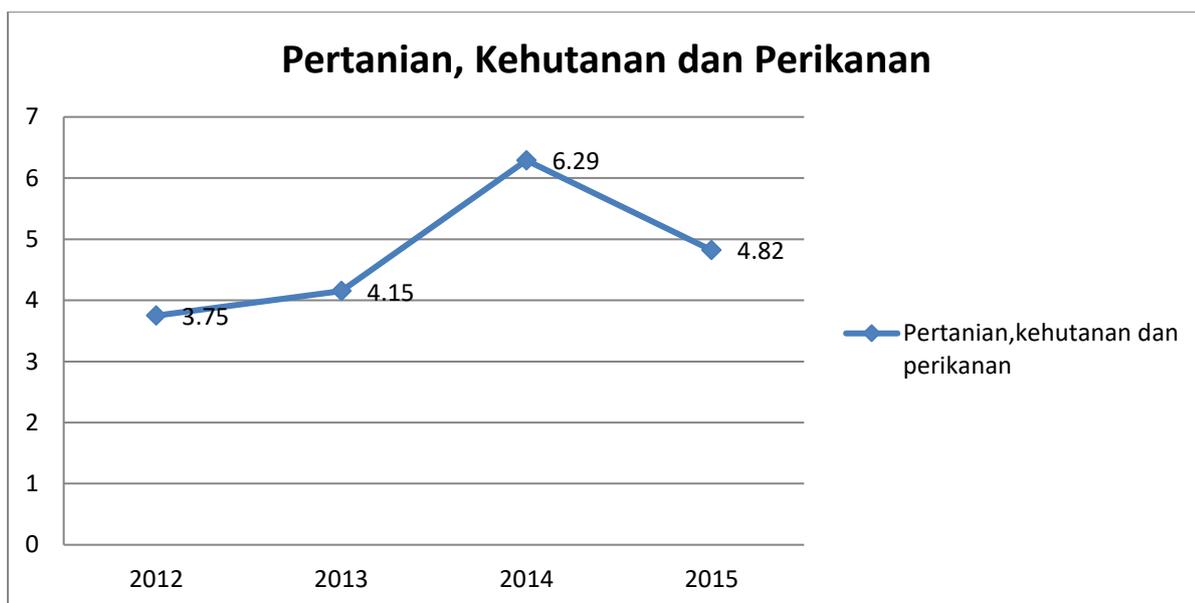
Tabel 3. Hasil Analisis Overlay Kabupaten Pasaman Tahun 2012-2015

No	Lapangan Usaha	RPr		RPs		LQ		Overlay
		Nilai	Notasi	Nilai	Notasi	Nilai	Notasi	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,79	-	0,89	-	2,13	+	--+
2	Pertambangan dan Penggalian	0,83	-	1,09	+	0,44	-	-+-
3	Industri Pengolahan	0,69	-	0,78	-	0,44	-	---
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,79	-	0,64	-	0,16	-	---
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,85	-	1,09	+	1,00	-	-+-
6	Konstruksi	1,39	+	1,20	+	0,51	-	++-
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,98	-	1,17	+	0,83	-	-+-
8	Transportasi dan Pergudangan	1,43	+	1,54	+	0,38	-	++-

9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,11	+	1,07	+	0,73	-	++-
10	Informasi dan Komunikasi	1,62	+	1,65	+	0,76	-	++-
11	Jasa keuangan dan Asuransi	0,82	-	1,10	+	0,79	-	-+-
12	Real Estat	0,94	-	0,92	-	0,69	-	---
13	Jasa Perusahaan	1,19	+	1,01	+	0,12	-	++-
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	0,47	-	0,68	-	1,22	+	--+
15	Jasa Pendidikan	1,38	+	1,46	+	0,57	-	++-
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,35	+	1,27	+	0,70	-	++-
17	Jasa Lainnya	1,12	+	0,82	-	0,52	-	---

Sumber : BPS 2016 (Data Diolah)

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari campur tangan pemerintah. Seharusnya pemerintah daerah mampu mengembangkan sektor basis yang potensial dengan perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan sektoral dan menciptakan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1 : Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Pasaman Tahun 2012-2015

Sumber : BPS Kabupaten Pasaman (Data Diolah)

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada ketiga analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini yaitu analisis MRP, analisis LQ, dan analisis Overlay di Kabupaten Pasaman tahun 2012-2015, maka diperoleh kesimpulan bahwa belum adanya sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, baik di daerah Kabupaten Pasaman maupun di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan sebagai sektor basis sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman. Sedangkan sektor yang berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai LQ sebesar 2,13

persen, tetapi sektor tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah terbukti dari analisis MRP dengan nilai dibawah 1,00 persen. Oleh karena itu diperlukannya campur tangan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam memaksimalkan potensi sektor basis di Kabupaten Pasaman.

5.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Perlunya meningkatkan perhatian terhadap sektor basis di Kabupaten Pasaman tanpa menyampingkan sektor-sektor non basis, karena sektor basis mampu mempengaruhi pertumbuhan sektor non basis sehingga menjadi sektor basis ekonomi baru.
2. Dalam perencanaan pembangunan wilayah hendaknya mengutamakan pertumbuhan sektor-sektor basis ekonomi di Kabupaten Pasaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. 2005. Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan. P4W press. Bogor.
- Arsyad, L. 2004. Ekonomi Pembangunan. BP-STIE-YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2016. Kabupaten Pasaman
- Badan Pusat Statistik. 2016. Sumatera Barat Dalam Angka 2016. Padang
- Glasson J. 1974. Pengantar Perencanaan Regional. Paul Sitohang, penerjemah (1990). Jakarta (ID): Lembaga Penerbit FE UI.
- Priyarsono DS, Sahara, Firdaus M. 2007. Ekonomi Regional. Jakarta (ID): Universitas Terbuka.
- Rustiadi, et al. 2011. Perencanaan dan pengembangan wilayah. Jakarta. Crespent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sjafrizal.2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 1996. Makro Ekonomi Edisi Ke – 2. Jakarta. Erlangga
- Tambunan, T. 2016. Pembangunan Ekonomi Inklusif Sudah Sejauh Mana Indonesia. Jakarta. LP3ES.
- Tarigan R. 2012. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Edisi Revisi. Medan. Bumi Aksara.
- Tarigan R. 2015. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi. Medan. Bumi Aksara.